

**LAPORAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TRIWULAN I TAHUN 2019**



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Alamat Jalan Jend. Ahmad Yani No. 9 , Telpon (0517) 21263 Faxes. (0517) 24525
Email : pmdhss@gmail.com
Kandangan 71211

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. UMUM

Laporan Kinerja ini dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan. Dalam Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 ini disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai Indikator Kinerja SKPD yang ditetapkan dalam Renja-SKPD.

Penyusunan Laporan Kinerja ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “good governance”. Disamping itu juga dalam rangka memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan Anggaran.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan posisi yang strategis bagi Desa. dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Salah satu dari nawacita Pemerintahan saat ini yaitu membangun dari pinggiran telah memposisikan Desa pada posisi yang strategis, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 yang menargetkan sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang berkelanjutan bagi pengentasan 5000 Desa Tertinggal dan peningkatan sedikitnya 2000 Desa Mandiri.

Dalam ruang lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memiliki 144 Desa, dimana muara dari setiap program dan kegiatan organisasi perangkat daerah dalam mendukung capaian visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, agamis dan produktif, semua menuju sasaran pada titik yang sama yaitu masyarakat Hulu Sungai Selatan yang tinggal di Desa-Desa dan Kelurahan. Dalam hal ini perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan organisasi perangkat daerah sehingga dalam membangun masyarakat yang ada di desa bisa efektif dan efisien. Ini merupakan tantangan yang cukup besar bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok memberdayakan masyarakat dan desa

untuk bisa mensinergikan program dan kegiatan pemberdayaan yang ada pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pada sisi yang lain Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul yang dimilikinya, Disamping itu dengan adanya Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi dana Desa dan sumber-sumber lain yang dikelola oleh Pemerintah Desa menuntut adanya kesiapan pemerintah desa baik dari segi kelembagaan dan ketersediaan aparatur desa yang profesional dan seperangkat aturan sehingga desa mampu mengelola semua potensi dan sumber-sumber daya yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki tanggungjawab yang besar untuk menyiapkan Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Pada kondisi saat ini kapasitas pemberdayaan masyarakat desa masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata nilai indeks desa membangun Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih rendah dan masih adanya desa dengan status desa tertinggal. Indeks desa membangun adalah komposit dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi. Disamping itu Desa merupakan institusi pemerintahan yang paling rendah dan berhadapan langsung dengan masyarakat yang dilayani. Seiring dengan perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi maka pemerintah desa juga dituntut adanya paradigma pelayanan masyarakat yang cepat, mudah dan prima dengan memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut. Namun kesiapan sarana prasarana dan kemampuan sumber daya manusia di desa belum mampu mengimbangi laju perkembangan teknologi informasi. Hal ini terlihat dari minimnya pelayanan pemerintah desa yang telah menerapkan penggunaan teknologi informasi.

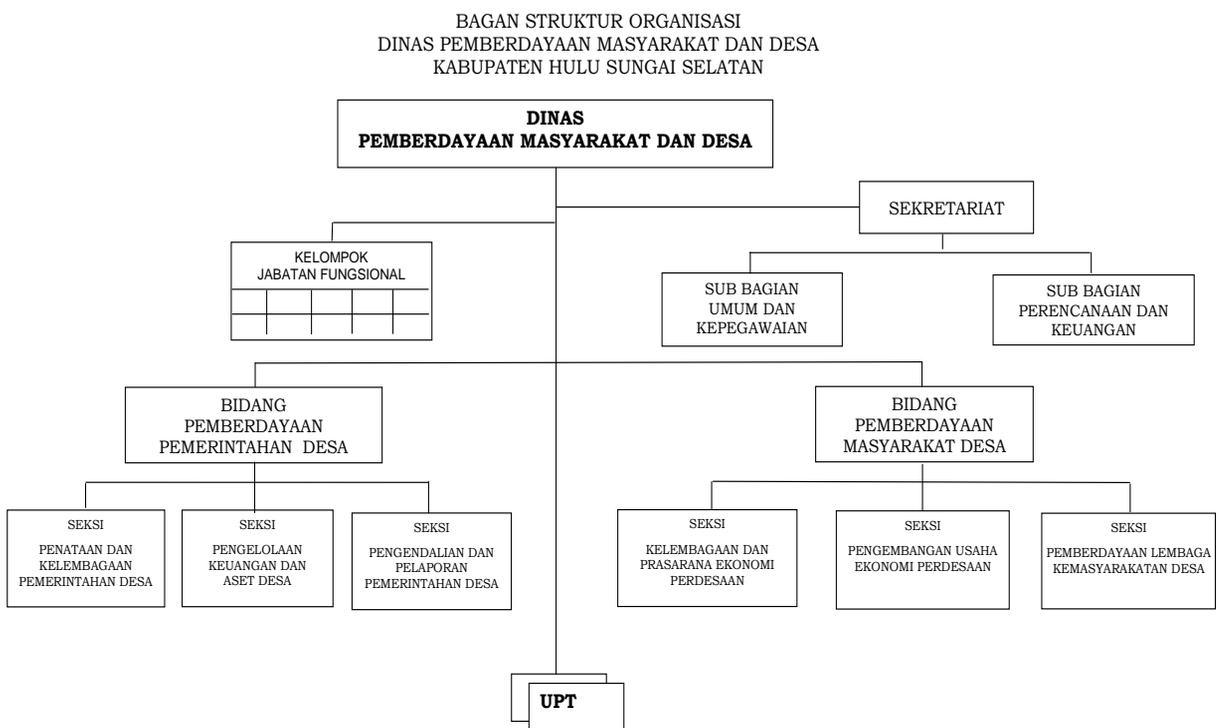
1.2. Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa, dengan tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penataan desa dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Perumusan kebijakan dibidang penataan desa dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat;

- c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penataan desa dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan dibidang penataan desa dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang penataan desa dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desasebagaimana gambar berikut ini.



Gambag 1.1 : Struktur Organisasi dan Tata Laksana Dinas PMD berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 29 Tahun 2019

BAB I

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan posisi yang strategis bagi Desa. dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yang secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, pengawasan dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat melalui bidang penataan dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PMD. Sesuai Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai kewajiban mewujudkan Misi ke-4 dan Misi ke-5 di dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta penelaahan terhadap RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2018-2023 yang diperkaya dengan melihat Rencana Strategis Kementerian Desa, PDTT Republik Indonesia 2014-2019 dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021 maka dirumuskan isu-isu strategis Dinas PMD pada 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut :

- a.** Peningkatan Optimalnya Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan dan Wawasan Lingkungan

Administrasi perdesaan semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi isu yang sangat penting untuk diakomodir.

Disamping peran strategis pembangunan level *bottom* banyak diakomodir Desa, garda terdepan pelayanan yang bersentuhan dengan masyarakat adalah desa, sehingga kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa menjadi sangat penting untuk ditingkatkan. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan karakter dan pondasi perekonomian serta peningkatan pemberdayaan masyarakat di perdesaan masih belum berjalan optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya kapasitas kelembagaan di desa sehingga kualitas pengelolaan desa menjadi tidak begitu efektif dan efisien. Oleh karena itu, perluasan jangkauan pelayanan melalui peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar perlu untuk diupayakan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Keberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa dalam mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan dapat diukur dari nilai indeks desa membangun (IMD). Menurut Permendes, Pembangunan Desa Tertinggal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM) bahwa IDM adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa. Berdasarkan nilai IDM maka status perkembangan desa dapat diklasifikasikan menjadi 5 (lima) kategori dari status tertinggi ke rendah yaitu Desa Mandiri atau Desa Sembada, Desa Maju atau Desa Pra Sembada, Desa Berkembang atau Desa Madya, Desa Tertinggal atau Desa Pra Madya dan Desa Sangat Tertinggal atau desa Pratama.

Perkembangan desa pada saat awal pelaksanaan Renstra di Kabupaten Hulu Sungai Selatan didominasi oleh Desa berkembang sebanyak 99 Desa (69%), dengan kategori tertinggal sebanyak 39 Desa (27 %) serta Desa kategori maju sebanyak 6 Desa (4%). Adapun desa sangat tertinggal sudah tidak ada lagi, namun demikian stataus desa belum ada yang mencapai status desa mandiri. Hal ini merupakan tantangan tersendiri dan menjadi salah satu fokus target kinerja yang akan dicapai oleh Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk meningkatkan status perkembangan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan lima tahun kedepan.

- b. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas, Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis.

Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terlihat belum sedemikian optimal. Hal ini terbukti dari koordinasi lintas kategorial serta akuntabilitas aparatur pemerintah yang masih perlu ditingkatkan. Mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Disamping itu, keberhasilan program kepala daerah dan pembangunan daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, perwujudan tata

pemerintahan yang baik sangat perlu untuk ditingkatkan.

Tuntutan pembangunan modern memaksa pemerintah beradaptasi dengan teknologi informasi. Sehingga pelayanan dengan berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini mampu mengakomodir belum optimalnya pelayanan publik serta paradigma mainstream masyarakat yaitu urusan pelayanan di pemerintah daerah sangat birokratif dan berbelit. Sampai pada tahun 2017, penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih belum berjalan optimal. Sehingga masih perlu mendapatkan proporsi afirmasi lebih. Inilah sebabnya mengapa pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih perlu untuk ditingkatkan

Desa merupakan bagian wilayah pemerintahan terkecil di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka wajah dan kualitas pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercermin dari kualitas pelayanan di Desa selaku lembaga pemerintah pada level paling bawah.

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat pada pemerintahan desa terus digalakkan dimulai dengan adanya kebijakan Desa Model yaitu pembangunan kantor Desa yang representative pada semua Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan pada tahun 2018 semua Kantor Desa di Kabupaten Hulu Sungai selatan telah permanen dengan konstruksi dan bentuk yang representative disamping itu juga pengadaan sarana dan prasarana seperti perangkat komputer dan meja kerja dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas PMD Kab. Hulu Sunyai Selatan,.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja

Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Adapun Indikator Kinerja Dinas PMD yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	4	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki Pelayanan publik yang berkualitas. Komponen penilaian terdiri dari pengungkit 60% dan hasil 40%	Permen PAN RB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
2	Nilai/Predikat AKIP	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%	Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKj Instansi Pemerintah.
3	Indeks Desa Membangun	Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa dan menunjukkan tingkat kemajuan dan kemandirian suatu desa. $IDM = \frac{\sum IDM \text{ se Kab.HSS}}{\sum \text{Desa se Kab.HSS}}$ IDM : Rata-rata Indeks Desa Membangun Kab.HSS $\sum IDM \text{ se Kab.HSS}$: Jumlah IDM Desa se Kab.HSS $\sum \text{Desa se Kab.HSS}$: Jumlah Desa se Kab.HSS	Permendes, PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun
4	Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	untuk mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat di desa perlu memanfaatkan kemajuan teknologi yaitu teknologi informasi. dihitung dengan rumus : $= \frac{\text{Jumlah Desa yang menggunakan aplikasi IT}}{\text{Jumlah Desa se Kab.HSS}} \times 100 \%$	Hasil Evaluasi dan monitoring atas penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa

Orgnisasi Perangkat Daerah dibentuk dalam rangka mencapai indikator kinerja Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas PMD Kab.HSS yang mendukung pencapaian RPJMD Pemkab. Hulu Sungai Selatan yaitu untuk mencapai Misi 4 dan misi 5 sebagaimana terlihat pada tabel di atas.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisi tentang penugasan dari kepala daerah sebagai pemberi amanah kepada pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program /kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Tahun anggaran 2018 disahkan maka dilaksanakan perjanjian kinerja oleh pejabat masing-masing kepada atasan langsung secara berjenjang mulai dari pejabat tinggi pratama, administrator dan pengawas sebagai tolak ukur dalam penilaian kinerja. Indikator kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama merupakan indikator kinerja SKPD Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dimana masing-masing indikator kinerja akan dicapai oleh pejabat administrator melalui pelaksanaan program. Demikian selanjutnya indikator kinerja pejabat administrator yang akan dicapai melalui pelaksanaan program berisi kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat pengawas. Adapun indikator kinerja Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 , sebagai berikut .

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.HSS Tahun 2019

No	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan	Taerget Kinerja 2019	TARGET KINERJA				PENANGGUNG JAWAB
				TRW.I	TRW.II	TRW. III	TRW.IV	
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	21,50	0	0	0	21,50	Kepala Dinas
2.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa	Nilai / Predikat AKIP	79,41 (BB)	0	0	0	79,41 (BB)	Kepala Dinas
2.1.	Program Peningkatan Perencanaan,Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen keuangan daerah	100% (15/15)	66,67% (18/22)	77,78% (21/27)	92,59% (25/27)	100% (27/27)	Sekretaris
a.	Penyusunan Dokumen Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	12	8	10	11	12	
b.	Penyusunan Dokumen AKIP	Jumlah Dokumen AKIP yang memenuhi kualitas	15	10	11	14	15	Sda
3.	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	Indeks Desa Membangun	0,64	0	0	0	0,64	Kepala Dinas
3.1	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	73,63% (1198/ 1627)	71,85% (1169/1627)	72,71% (1176/1627)	73,14% (1183/1627)	73,63% (1198/ 1627)	Kabid Pemberd Masyarakat Desa
a.	Bimbingan teknis pengurus LPM Desa	Jumlah Pengurus LPM yang terampil	40	0	0	40	0	Kasi Pemberd LKD
b.	Bimbingan Teknis RT/RW	Jumlah Pengurus RT/RW yang terampil	40	0	0	0	40	Sda
c.	Penilaian Posyandu	Jumlah Posyandu tk kec yang berprestasi dan dinilai Tk.Kab	11	0	11	0	0	Sda
d.	Penilaian Gotong royong Masyarakat	Jumlah desa yg memiliki budaya gotong royong tinggi yang di nilai	11 Desa	5	6	0	0	Sda
e.	Penilaian Inovasi Teknologi Tepat Guna	Jumlah Inovator TTG yang terseleksi	3	0	0	3	0	Sda
3.2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berkembang	13,88% (20/144)	3,47% (5/144)	6,94% (10/144)	10,41% (15/144)	13,88% (20/144)	Kabid Pemberd Masyarakat Desa
a.	Workshop Kemitraan Bumdes	Jumlah BUMDes yang melaksanakan kerjasama	40	0	0	40	0	Kasi Pengembangan Usaha Ekon Perdes
b.	Sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah pemangku kepentingan kawasan perdesaan	60	0	0	60	0	Sda

No	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan	Taerget Kinerja 2019	TARGET KINERJA				PENANGGUNG JAWAB
				TRW.I	TRW.II	TRW. III	TRW.IV	
4	Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	Persentase Pemerintah Desa yang menggunakan Teknologi Informasi dalam Pemberian pelayanan	8,33% (12/144)	2,08% (3/144)	4,16% (6/144)	6,25% (9/144)	8,33% (12/144)	Kepala Dinas
4.1.	Program Pembinaan dan Pelayanan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang berkinerja baik	25,69% (37/144)	19,44% (28/144)	21,52% (31/144)	23,61% (34/144)	25,69% (37/144)	Kabid Pemberdayaan Pemerintahan Desa
a.	Evaluasi perencanaan dan rancangan APBDes	Jumlah Berita Acara Evaluasi APBDes	288	0	0	144	144	Kasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
b.	Pelaksanaan e-Monitoring System Desa	Jumlah Desa yang menerapkan e-Monitoring system	22 Desa	0	0	22	0	Kasi Pengendalian dan Pelaporan Pempdes
c.	Evaluasi perkembangan desa/kelurahan	Jumlah Desa/kelurahan yang di evaluasi	12 Desa/ Kelurahan	0	12	0	0	Sda

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama triwulan yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan pada target triwulan. Pada bab ini juga akan disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi anggaran sampai dengan triwulan I Tahun 2019 untuk mencapai target kinerja dalam perjanjian kinerja.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan dasar dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban dalam mencapai indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang termuat dalam RPJMD.

Dinas PMD Kab. Hulu Sungai Selatan memiliki 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, yang merupakan penjabaran dari indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada misi ke-empat yaitu Mengoptimalkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yaitu dan misi ke lima yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Untuk mencapai indikator kinerja utama tersebut terdapat 7 (tujuh) program utama yang terdiri atas 12 Kegiatan. Adapun Capaian kinerja indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan akan diuraikan lebih lanjut yang terbagi atas 2 bagian meliputi capaian kinerja pada Sekretariat Dinas dan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa dan Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa.

a. Capaian Kinerja Sekretariat

Pada Sekretariat terdapat 2 indikator kinerja utama yaitu indeks reformasi dan nilai/predikat AKIP. Adapun capaian program dan kegiatan utama pendukung pencapaian IKU pada Sekretariat Dinas, sebagai berikut.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sekretariat Dinas PMD Triwulan I 2019

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan	Taerget Kinerja 2019	TARGET KINERJA				REALISASI TRW.I	CAPAIAN Trw I	KET
				TRW.I	TRW.II	TRW. III	TRW.IV			
1.	Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	21,50	0	0	0	21,50	0	0	Belum dilakukan pengukuran
2.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa	Nilai / Predikat AKIP	79,41 (BB)	0	0	0	79,41 (BB)	0	0	Belum dilakukan pengukuran
2.1.	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen keuangan daerah	100% (15/15)	66,67% (18/22)	77,78% (21/27)	92,59% (25/27)	100% (27/27)	66,67% (18/22)	100%	Tercapai sesuai target
a.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	12	8	10	11	12	8	100%	Tercapai sesuai target
b.	Kegiatan Penyusunan Dokumen AKIP	Jumlah Dokumen AKIP yang memenuhi kualitas	15	10	11	14	15	10	100%	Tercapai sesuai target

Penilaian Indeks reformasi birokrasi SKPD dilaksanakan berdasarkan Permen PAN RB Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Permen PAN RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi diperoleh melalui dua tahapan yaitu : pertama penilaian secara mandiri oleh Dinas PMD atas pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan pada lembar kerja evaluasi. Sampai dengan triwulan I 2019 Dinas PMD telah melakukan penilaian secara mandiri atas pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan melalui pengisian kertas kerja PMPRB secara online pada website Kemen PAN RB pada alamat : pmprb.menpan.go.id. Berdasarkan penilaian mandiri tersebut di peroleh hasil nilai sebesar 23,20 dengan rincian sebagai berikut :

NO	Proses (Area Perubahan)	Nilai
1	Manajemen Perubahan	2,50
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	1,25
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50
4	Penataan Tata Laksana	2,00
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	3,50
6	Penguatan Akuntabilitas	3,00
7	Penguatan Pengawasan	5,25
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	4,20
Jumlah		23,20

Nilai di atas merupakan hasil penilaian sendiri oleh Dinas PMD yang selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluasi Kementerian PAN RB atas kelengkapan bukti-bukti dokumen pendukungnya. Sampai dengan triwulan I 2019 evaluasi oleh Tim Kementerian PAN RB belum dilaksanakan sehingga belum bisa diketahui capaian kinerja atas indikator tersebut.

Nilai AKIP adalah hasil evaluasi atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku APIP atas Permen PAN Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi 5 komponen, yaitu :

- a. Perencanaan Kinerja
- b. Pengukuran Kinerja
- c. Pelaporan Kinerja
- d. Evaluasi Internal
- e. Capaian Kinerja

Sampai dengan triwulan I tahun 2019 atas pelaksanaan SAKIP Dinas PMD belum dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten sehingga belum diketahui nilai AKIP.

Program yang dilaksanakan untuk mencapai target Nilai AKIP yaitu Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, yang terdiri atas 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan penyusunan dokumen keuangan dan kegiatan penyusunan dokumen AKIP. Adapun indikator kinerja atas pelaksanaan program ini yaitu tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP & tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen keuangan daerah.

Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dengan target kinerja sebesar 66,67 % atau 18 Dokumen yang harus dipenuhi terdiri dari 8 dokumen laporan keuangan yang dipenuhi pada triwulan I sebagai berikut :

No	Nama Dokumen	Jumlah
1	Renstra	1 Dokumen
2	Renja	1 Dokumen
3	RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan	2 Dokumen
4	Pra RKA Murni	1 Dokumen
5	RKA Murni	1 Dokumen
6	DPA	1 Dokumen
7	Laporan Triwulan I	1 Dokumen
Jumlah		8 Dokumen

Sedangkan untuk menyusun dokumen SAKIP terdapat 10 Dokumen yang telah dipenuhi sampai dengan Triwulan I, yaitu :

No	Nama Dokumen	Jumlah
1	Renstra	1 Dokumen
2	Berita Acara Reviu Renstra	1 Dokumen
3	Cascading kinerja Tahun 2019	1 Dokumen
4	Renja 2019 Murni	1 Dokumen
5	SK IKU Tahun 219	1 Dokumen
6	PK Murni pejabat struktural dan pelaksana	1 Dokumen
7	PK Perubahan pejabat struktural dan pelaksana	1 Dokumen
8	Rencana Aksi 2019	1 Dokumen
9	Capaian Kinerja Triwulan Tahun 2019	1 Dokumen
10	Peta Strategis dan struktur organisasi serta template format keselarasan kinerja	1 Dokumen
Jumlah		10 Dokumen

Faktor pendukung tercapainya target kinerja pada indikator ini antara lain karena kedisiplinan petugas dalam memenuhi dokumen-dokumen perencanaan maupun keuangan sesuai jadwal yang ditetapkan. Disamping itu juga adanya bimbingan dari Tim SAKIP kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Dinas PMD dalam memenuhi dokumen SAKIP.

b. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk mencapai kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada Dinas PMD dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa. Pada Urusan pemberdayaan masyarakat desa terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama sebagai tolak ukur dari sasaran strategis Dinas PMD yaitu: Pertama, Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu rata-rata nilai IDM) seluruh Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibandingkan dengan jumlah Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk mencapai kinerja tersebut terdapat dua program utama yang terbagi atas 7 kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kedua, Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan. Untuk mencapai kinerja tersebut terdapat 1 program dan 3 kegiatan utama yang dilaksanakan.

Adapun capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang, diuraikan lebih lanjut berikut ini.

Tabel. 3.2

**Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Triwulan I 2019**

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan	Taerget Kinerja 2019	TARGET KINERJA				TRW.I	CAPAIAN Trw I	KET
				TRW.I	TRW.II	TRW. III	TRW.IV			
3.	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	Indeks Desa Membangun	0,64	0	0	0	0,64	0	0	Belum dilakukan pengukuran
3.1	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	73,63% (1198/1627)	71,85% (1169/1627)	72,71% (1176/1627)	73,14% (1183/1627)	73,63% (1198/1627)	68,65% (1138/1627)	95,55%	Tidak tercapai target
a.	Bimbingan teknis pengurus LPM Desa	Jumlah Pengurus LPM yang terampil	40	0	0	40	0	0	0	Belum sampai jadwal dilaksanakan
b.	Bimbingan Teknis RT/RW	Jumlah Pengurus RT/RW yang terampil	40	0	0	0	40	0	0	Belum sampai jadwal dilaksanakan
c.	Penilaian Posyandu	Jumlah Posyandu tk kec yang berprestasi dan dinilai Tk.Kab	11	0	11	0	0	0	0	Tercapai sesuai target
d.	Penilaian Gotong royong Masyarakat	Jumlah desa yg memiliki budaya gotong royong tinggi yang di nilai	11 Desa	5	6	0	0	5	100%	Tercapai sesuai target
e.	Penilaian Inovasi Teknologi Tepat Guna	Jumlah Inovator TTG yang terseleksi	3	0	0	3	0	0	0	Belum sampai jadwal dilaksanakan
3.2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berkembang	13,88% (20/144)	3,47% (5/144)	6,94% (10/144)	10,41% (15/144)	13,88% (20/144)	1,38% (2/144)	39,77 %	Tidak mencapai target
a.	Workshop Kemitraan Bumdes	Jumlah BUMDes yang melaksanakan kerjasama	40	0	0	40	0	0	0	Belum sampai jadwal dilaksanakan
b.	Sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah pemangku kepentingan kawasan perdesaan	60	0	0	60	0	0	0	Belum sampai jadwal dilaksanakan

Indeks Desa Membangun (IDM) yang menjadi salah satu IKU Dinas PMD adalah rata-rata nilai IDM Desa se Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pengukuran IDM dilakukan secara berjenjang mulai tingkat Desa dan verifikasi di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan tingkat Nasional. Secara resmi nilai IDM ditetapkan oleh Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Sampai dengan Triwulan I 2019 proses pengukuran IDM tahun 2019 telah dilaksanakan di tingkat Desa dan verifikasi di tingkat Kecamatan dan Kabupaten serta Berita Acara hasil pengukuran IDM se Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah diserahkan ke Provinsi Kalsel. Namun masih proses validasi di tingkat Kementerian Desa sehingga belum diketahui nilai IDM untuk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah nilai komposit dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi. IDM yang dimaksud sebagai IKU Dinas PMD adalah rata-rata IDM yang dicapai oleh seluruh Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan rumus :

$$IDM = \frac{\sum IDM \text{ se Kab.HSS}}{\sum \text{Desa se Kab.HSS}}$$

IDM : Rata-rata IDM Kab.HSS
 \sum IDM se Kab.HSS : Jumlah IDM Desa se Kab.HSS
 \sum Desa se Kab.HSS : Jumlah Desa se Kab.HSS

Proses pengukuran IDM dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa kemudian diverifikasi di tingkat Kecamatan dan Kabupaten serta provinsi dan nasional. Untuk pengukuran IDM tahun 2019 saat ini telah dilakukan pengukuran mulai tingkat Desa, Kabupaten dan datanya sudah diserahkan ke tingkat Provinsi, dan sedang dalam proses evaluasi oleh Kementerian Desa, PTTT sehingga sampai dengan triwulan I 2019 nilai rata-rata IDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum diketahui. Nilai IDM menunjukkan status perkembangan Desa, sehingga peningkatan IDM juga menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa, khususnya dalam penyediaan anggaran kegiatan untuk meningkatkan nilai IDM Desa yang bersangkutan. Pada Dinas PMD tahun 2019 terdapat 2 (dua) program yang terkait langsung dengan upaya peningkata nilai IDM yaitu :

- a. Program peningkatan pemberdayaan masyarakat, meliputi 5 kegiatan, dan
- b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan, meliputi 2 Kegiatan.

Adapun indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan program-program ini yaitu :

- 1). Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif.

Menurut Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, LKD adalah mitra Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat serta perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

terdapat 1.627 LKD terdiri atas jenis LKD yaitu : 148 LPM Desa/Kel, 148 PKK Desa/Kel, 1.030 RT/RK, 296 Posyandu serta 5 Lembaga Adat.

LKD yang Aktif, yaitu jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki sekretariat yang tetap
- b. Memiliki legalitas, yaitu ditetapkan dengan Keputusan Kades
- c. Berpartisipasi ikut secara aktif dalam forum Musrenbang di desa
- d. Aktif terlibat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa
- e. Aktif menggerakkan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi LKD yang dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Masyarakat sampai dengan Triwulan I 2019 terdapat 1.202 LKD Aktif. Dengan demikian persentase LKD Aktif sampai dengan Triwulan I 2019, yaitu :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase LKD Aktif} &= \frac{\text{Jumlah LKD Aktif}}{\text{Jumlah LKD se Kab.HSS}} \\
 &= \frac{1.138}{1.627} \\
 &= 68,65 \%
 \end{aligned}$$

Realisasi ini jika dibandingkan dengan target kinerja Triwulan I (71,85%) maka capaiannya adalah 95,55 % atau belum mencapai target yang ditetapkan. Faktor yang menyebabkan ketidaktercapaian target pada indikator kinerja ini, antara Lain :

- a. Pada triwulan I prioritas pada pemenuhan aspek administrasi persiapan pelaksanaan kegiatan.
- b. Pembinaan dan monitoring terhadap LKD yang ada belum banyak dilakukan.

2). Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berkembang.

Menurut Permendagri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa bahwa BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan jasa usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Upaya pembentukan BUMDes melalui fasilitasi dari Pemerintah kabupaten Hulu Sungai Selatan telah dilaksanakan pada periode Rentra 2014-2018, sehingga pada tahun 2018 ini semua Desa sudah memiliki BUMDesa. Upaya selanjutnya yaitu membina BUMDes yang sudah terbentuk tersebut sehingga tetap eksis dan berkembang.

BUMDes dinyatakan berkembang jika memenuhi kriteria, sebagai berikut :

- a. Memiliki minimal 2 (dua) unit usaha yang produktif
- b. Memberi kontribusi ke PADes minimal 10 % dari penyertaan modal per tahun.
- c. Memberi kontribusi minimal 50 % untuk Rumah Tangga Miskin di Desa tersebut.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi atas BUMDes-BUMDes yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa sampai dengan Triwulan I 2019 terdapat 2 BUMDes yang memenuhi kriteria sebagai BUMDes yang berkembang, yaitu :

- 1). BUMDes “Bhakti” Desa Gambah Dalam Barat
- 2). BUMDes “ Al Karomah” Desa Sungai Mandala

Dengan demikian persentase BUMDes yang berkembang dihitung dengan rumus :

$$= \frac{\text{Jumlah BUMDes berkembang}}{\text{Jumlah BUMDes se Kab.HSS}} \times 100\% = (2/144) \times 100\% = 1,38\%$$

Realisasi ini jika dibandingkan dengan target kinerja triwulan I (3,47%) maka capaian kinerja sebesar 39,77% atau belum mencapai target. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya realisasi sesuai target meningkatkan BUMDes yang berkembang, yaitu :

- 1). Rendahnya SDM pengurus BUMDes
- 2). Terbatasnya modal usaha
- 3). Kurangnya pembinaan terhadap BUMDes

Upaya yang akan dilakukan oleh Dinas PMD dalam meningkatkan jumlah BUMDes yang berkembang yaitu dengan memaksimalkan peran pendamping P3MD untuk lebih intensif dalam pembinaan BUMDes.

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pada Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa Triwulan I 2019

No	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan	Taerget Kinerja 2019	TARGET KINERJA				CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I 2019	KETERANGAN	
				TRW.I	TRW.I	TRW. II	TRW.IV			
4	Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	Persentase Pemerintah Desa yang menggunakan Teknologi Informasi dalam Pemberian pelayanan	8,33%	2,08%	4,16%	6,25%	8,33%	100%	Tercapai sesuai target	
			(12/144)	(3/144)	(6/144)	(9/144)	(12/144)			(3/144)
4.1	Program Pembinaan dan Pelayanan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang berkinerja baik	25,69%	19,44%	21,52%	23,61%	25,69%	78,55%	Tidak mencapai target	
			(37/144)	(28/144)	(31/144)	(34/144)	(37/144)			(22/144)
a.	Evaluasi perencanaan dan rancangan APBDes	Jumlah Berita Acara Evaluasi APBDes	288	0	0	144	144	0	0	Belum sampai jadwal dilaksanakan
b.	Pelaksanaan e-Monitoring System Desa	Jumlah Desa yang menerapkan e-Monitoring sistem	22 Desa	0	0	22	0	0	0	Belum sampai jadwal dilaksanakan
c.	Evaluasi perkembangan desa/kelurahan	Jumlah Desa/kelurahan yang di evaluasi	12 Desa/ Kelurahan	0	12	0	0	0	0	Belum sampai jadwal dilaksanakan

Tuntutan pembangunan modern memaksa pemerintah beradaptasi dengan teknologi informasi. Sehingga pelayanan dengan berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini mampu mengakomodir belum optimalnya pelayanan publik serta paradigma mainstream masyarakat yaitu urusan pelayanan di pemerintah daerah sangat birokratif dan berbelit.

Pengukuran terhadap pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan dilakukan secara mandiri oleh Dinas PMD melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ke Desa-Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Desa merupakan bagian wilayah pemerintahan terkecil di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka wajah dan kualitas pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercermin dari kualitas pelayanan di Desa selaku lembaga pemerintah pada level paling bawah. Dinas PMD telah melalui monitoring terhadap 40 Desa terpilih. Salah satu hasil monitoring tersebut diketahui bahwa telah ada 3 Desa yang menerapkan penggunaan Teknologi Informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu melalui aplikasi komputer yaitu :

- 1). Desa Gambah Luar Muka
- 2). Desa Bamban Selatan
- 3). Desa Muning Baru

Dengan demikian sampai dengan Triwulan I 2019 realisasi desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat yaitu :

$$= (3/144) \times 100\%$$

$$= 2,08\%$$

Maka realisasi ini jika dibandingkan dengan target kinerja Triwulan I (2,08), sudah mencapai target.. Faktor penghambat untuk meningkatkan penggunaan IT dalam pelayanan umum di Desa, antara lain :

- a. Lemahnya SDM Perangkat Desa dalam penggunaan IT
- b. Jaringan internet yang belum menjangkau seluruh desa
- c. Keterbatasan sarana prasarana pelayanan.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan penggunaan IT pelayanan di Desa antara lain :

- 1). Penyediaan sarana prasarana pelayanan dan jaringan internet yang memadai di Kantor Desa menggunakan anggaran keuangan Desa.
- 2). Disamping itu kerjasama dengan Dinas Kominfo kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam memberikan pembinaan
- 3). Melaksanakan pembinaan terhadap Perangkat Desa dalam pengelolaan pelayanan di desa.

Adapun program di Dinas PMD untuk mendukung pencapaian indikator tersebut yaitu melalui Program Pembinaan dan Pelayanan Pemerintahan Desa dengan indikator kinerja program yaitu persentase pemerintah desa yang berkinerja baik. Kriteria Pemerintah Desa berkinerja baik yaitu :

- a. Melaksanakan administrasi Desa dengan tertib
- b. Memiliki perencanaan keuangan dan pembangunan desa dengan baik
- c. Pelaporan keuangan desa yang akuntabel
- d. Pelaporan Penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu

Mekanisme untuk menilai kinerja pemerintah desa dilaksanakan dengan melakukan monitoring dan evaluasi. Dinas PMD telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 40 Desa terpilih. Hasil evaluasi terhadap kriteria tersebut di atas sampai dengan Triwulan I Tahun 2019 terdapat 33 Desa yang berkinerja baik. Dengan demikian persentase pemerintah desa yang berkinerja baik sampai triwulan I tahun 2019, dengan rumus perhitungan :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Pemerintah Desa berkinerja Baik}}{\text{Jumlah Desa se Kab.HSS}} \\
 &= \frac{22 \text{ Desa}}{144 \text{ Desa}} \times 100\% \\
 &= 15,27 \%
 \end{aligned}$$

Dengan demikian realisasi kinerja ini jika dibandingkan dengan yang ditargetkan pada triwulan I 2019 (25,69%) baru mencapai 78,55% atau tidak mencapai target.

Adapun upaya ke depan yang akan dilaksanakan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa, antara lain :

- a. Meningkatkan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan manajemen pemerintahan desa.
- b. Memaksimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi ke desa.

3.2 Realisasi Anggaran

Pencapaian kinerja berbanding lurus dengan realisasi keuangan, sehingga setiap pengeluaran anggaran kas yang dilakukan oleh Dinas PMD dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Berikut ini disajikan realisasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Realisasi Keuangan Triwulan I Tahun 2019
Berdasarkan Urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019

A. Kesekretariatan (Layanan Penunjang Perangkat Daerah)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	Pagu ANGGARAN 2019	REALISASI Triwulan I	PERSENTASE
1	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1. Indeks Reformasi Birokrasi				
		2. Nilai/Predikat AKIP				
1.1	Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran	1.1.1 Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP & tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen keuangan daerah	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.586.000	1.220.000,00	12,73
			1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan	4.741.000	870.000,00	18,35
			2. Kegiatan Penyusunan Dokumen AKIP	4.845.000	350.000,00	7,22
		1.1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	650.966.600	107.747.811,00	16,55
			1. Kegiatan Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	54.241.600	5.236.000,00	9,65
			2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45.000.000	7.260.911,00	16,14
			3. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	14.000.000	0,00	0,00
			4. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	25.200.000	3.600.000,00	14,29
			5. Kegiatan Penyediaan jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Lainnya	44.850.000	9.750.000,00	21,74
			6. Kegiatan Rapat rapat koordinasi , konsultasi dan Lapangan	467.675.000	81.900.900,00	17,51
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	143.937.000	24.414.682	16,96
			1. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	97.987.000	20.417.000,00	20,84
			2. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	38.850.000	3.767.682,00	9,70
3. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	7.100.000	230.000,00	3,24			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	Pagu ANGGARAN 2019	REALISASI Triwulan I	PERSENTASE
			Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	582.402.400	71.872.500,00	12,34
			1. Peningkatan Pelayanan Kinerja Aparatur	87.870.000	2.490.000,00	2,83
			2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	494.532.400	69.382.500,00	14,03
2	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun				
	2.1 Meningkatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	166.665.000	23.505.000	14,10
			1. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurus LPM Desa	31.300.000	0	0,00
			2. Kegiatan Penilaian Gotong Royong Masyarakat	59.275.000	0	0,00
			3. Kegiatan Penilaian Inovasi Teknologi Tepat Guna	20.400.000	0	0,00
			4. Kegiatan Penilaian Posyandu	47.090.000	0	0,00
			5. Kegiatan Bimbingan Teknis RT / RW	8.600.000	0	0
	2.2 Meningkatkan lembaga ekonomi perdesaan yang berkembang	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berkembang	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	38.950.000	0	0
			1. Kegiatan Workshop Kemitraan Bumdes	24.520.000	0	0
			2. Kegiatan Sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	14.430.000	0	0

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	Pagu ANGGARAN 2019	REALISASI Triwulan I	PERSENTASE
3	Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan				
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Pemerintahan Desa yang berkinerja baik	Program Pembinaan dan Pelayanan Pemerintahan Desa	217.125.000	0	0,00
			1. Kegiatan Evaluasi Perencanaan dan Rancangan APBDes	136.455.000	0	0,00
			2. Kegiatan pelaksanaan e-Monitoring System Desa	44.370.000	0	0,00
			3. Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	36.300.000	0	0,00
JUMLAH			1.809.632.000	205.254.993	11,00	

Tabel di atas menerangkan bahwa penyerapan anggaran program dan kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2019 masih rendah, yaitu 11 %. Sehingga belum signifikan meningkatkan capaian kinerja yang telah ditetapkan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran antara lain :

- 1). Jadwal anggaran kas belum sampai, sebagian besar tersedia di triwulan III dan IV.
- 2). Perencanaan kegiatan yang kurang matang.

3.3 Prestasi yang Pernah diraih

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki tugas utama memberdayakan Pemerintah Desa dan memberdayakan masyarakat. Maka keberhasilan Dinas PMD dapat dilihat dari keberhasilan Pemerintah Desa maupun masyarakat yang menjadi binaan. Adapun prestasi yang dicapai sampai dengan Triwulan I tahun anggaran 2019 belum ada.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Capaian Indikator Kinerja Utama secara umum belum mencapai target yang telah ditetapkan, dengan realisasi yaitu :
 - 1). Indeks Reformasi Birokrasi belum dievaluasi oleh Tim Kemen PAN RB, namun dari penilaian mandiri (PMPRB) nilai indeks reformasi Dinas PMD sebesar 23,2.
 - 2). Nilai/Predikat AKIP belum dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka sampai dengan Triwulan I 2019 belum diketahui.
 - 3). Pengukuran IDM saat ini dalam tahap verifikasi IDM di Kementrian Desa dan belum dipublikasikan, sehingga belum diketahui nilai rata-rata IDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - 4). Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terdapat 3 Desa yang sudah memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat atau 2,08 % dari jumlah desa se Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- b. Langkah-langkah ke depan dalam rangka mencapai target kinerja antara lain :
 - 1). Mendorong PPTK untuk mempercepat realisasi pelaksanaan kegiatan.
 - 2). Meningkatkan koordinasi dengan Dinas-Dinas terkait yang secara tidak langsung memiliki tugas pokok dan fungsi yang dapat meningkatkan nilai IDM.

Demikian laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan Triwulan I Tahun 2019 ini disusun sebagaimana mestinya.

Kandangan, April 2019
Kepala Dinas,



S. KAMIDI, MIP
Pembina Tingkat I
NIP. 19731115 199302 1 002